



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN
SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan Keuangan Negara sangat diperlukan memperpanjang tambahan opsenten atas cukai bensin dan sebagainya yang sudah dipungut selama tahun-tahun yang lalu.

bahwa karena keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal 96 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMUNGUT TAMBAHAN OPSENTEN (EXTRA OPSENTEN) ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953.

Pasal 1.

Angka "1952" tersebut dalam Pasal 1 Undang.-undang Darurat Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 96) diubah menjadi " 1953".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Januari 1953.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
ttd
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 15 Januari 1953.
Menteri Kehakiman,
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN.

Sekitar soal yang berhubungan dengan cukai bensin dan cukai minyak semacam itu lainnya, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 huruf b dari ordonnantie 27 Desember 1886. S 1886, yaitu aturan dari pengenaan dan pelaksanaan cukai minyak-minyak tanah, maka sebab-sebab yang mengakibatkan diadakan aturan-aturan sementara dari pengenaan 300% opsenten atas cukai di atas tadi, masih tetap berlaku seluruhnya.

Cukuplah kiranya untuk menetapkan Undang-Undang Darurat tersebut di atas berlaku buat 1 tahun saja, yaitu untuk tahun 1953, sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 96), yang berlaku hingga akhir tahun 1952 dan yang pengesahannya sedang dikerjakan.

Sebagai penjelasan, cukup dengan menunjuk kepada nota penjelasan dari rencana pengesahan itu.

Pada kami adalah terkandung niat untuk dalam tahun takwim di muka, mengajukan rencana yang lebih luas coraknya, di dalam mana akan dipertimbangkan sampai mana opsenten-opsenten, baik yang mengenai cukai ataupun yang mengenai bea masuk dapat dimasukkan dalam Tarip dan diatur sedemikian hingga dapat dicegah pembuatan beberapa buah rencana Undang-undang mengenai hal-hal itu, tiap-tiap tahunnya.

Diketahui,

MENTERI KEHAKIMAN,

LOEKMAN WIRIADINATA.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 354